

# **LAMPIRAN**

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Menanyakan permasalahan yang dihadapi masyarakat pesisir;
2. Meminta pendapat informan mengenai RUSUNAWA;
3. Menggali pemahaman informan mengenai penataan ruang wilayah pesisir kota Bandar Lampung;
4. Meminta pendapat informan mengenai penataan ruang wilayah pesisir Kota Bandar Lampung.

## 1. Informan 1 (M/54)

Nama : Muchidin

Status : Kawin

Lama Tinggal : 54 Tahun

Pekerjaan : Ketua RT, Buruh

Informan pertama bernama Muchidin. Muchidin merupakan seorang Ketua RT 06 Lingkungan II Kelurahan Kangkung Kecamatan Telukbetung Selatan, berjenis kelamin laki-laki bersuku Jawa. Muchidin berusia 54 tahun dan bertempat tinggal di Kelurahan Kangkung Kecamatan Telukbetung Selatan. Muchidin hanya berpendidikan SR (Sekolah Rakyat) atau setingkat Sekolah Dasar, bapak 4 putra dan 2 orang putri ini sehari-hari bekerja sebagai buruh bangunan selain menjadi Ketua RT untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membiayai keperluan pendidikan anak-anaknya.

Mengenai pemahaman kawasan pesisir Kota Bandar Lampung, Muchidin mengatakan :

*“Kawasan pesisir merupakan tempat bertemunya wilayah daratan dan laut. Pada jaman dulu kawasan pesisir merupakan wilayah strategis transportasi. Sebagian besar warga pesisir merupakan mayoritas warga pendatang yang bekerja di sektor informal dan mereka tinggal di perkampungan informal dari berbagai etnis. Arus kedatangannya beragam, ada yang sudah mulai sejak tahun 1957, 1968 dan ada yang baru datang pada tahun 1988 bahkan tahun-tahun setelah 1990. Masyarakat pesisir Bandar Lampung sebagian besar merupakan masyarakat miskin yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan, buruh, tukang becak dan pedagang kecil, tukang jamu dan lain-lain. Sebagian besar masyarakat pesisir tidak memiliki status tanah tempat tinggal yang sah/legal di keluarkan oleh BPN namun penduduk sekitar tetap membangun tempat tinggal di lahan tersebut. Muchidin menjelaskan banyak penduduk di lingkungannya tidak memiliki sertifikat tanah*

*termasuk dirinya, apabila ada anggota masyarakat yang ingin mendirikan tempat tinggal di bibir pantai bahkan di atas laut sekalipun, cukup meminta izin kepada ketua lingkungan dan ketua RT setempat, karena tidak ada hak bagi ketua lingkungan dan ketua RT untuk melarang warga yang ingin mendirikan bangunan di bibir pantai. Telah terjadinya pergeseran bibir pantai karena adanya aktifitas penimbunan tanah oleh warga sekitar guna memperluas lahan untuk tempat tinggal mereka. Penimbunan tersebut terjadi bukan pula semata-mata aktifitas warga sekitar namun adanya penumpukan sampah dan tanah yang terbawa oleh ombak pantai sehingga terjadinya penimbunan yang mengakibatkan meluasnya wilayah daratan. Hal tersebut diyakini menjadi penyebab timbulnya daerah kumuh (slum area) sebab tidak adanya atau belum adanya peraturan resmi yang melarang masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan di bibir pantai.”*

Pada saat ditanya mengenai persepsi masyarakat terhadap penataan wilayah pesisir Kota Bandar Lampung, Muchidin menjelaskan :

*“Rencana Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menata kawasan pesisir merupakan bentuk dari program pembangunan pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menata kawasan pesisir yang saat ini sudah sangat kumuh. Secara pribadi saya mendukung program tersebut karena tujuannya untuk menata dan memperbaiki kota Bandar Lampung. Namun yang menjadi penyebab penolakan masyarakat sekitar apabila pemerintah merelokasi penduduk. Saya mendukung program tersebut asalkan saya tidak di pindahkan dari tempat tinggal saya. Apabila pemerintah merelokasi tempat tinggal kami maka ribuan masyarakat terancam kehilangan tempat tinggal dan kehilangan mata pencaharian. Karena sebagian besar masyarakat sekitar berpenghasilan sebagai nelayan, buruh bangunan, buruh pabrik dan berdagang dan rata-rata penghasilan mereka Rp. 10.000,- per hari.”*

## 2. Informan 2 (N/47)

Nama : Nurhayati

Status : Kawin

Lama Tinggal : 48 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Nurhayati merupakan Koordinator Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Kota Bandar Lampung, berjenis kelamin perempuan bersuku Jawa. Nurhayati bertempat tinggal di Kelurahan Bumiwaras Kecamatan Telukbetung Selatan. Nurhayati merupakan ibu rumah tangga yang hanya lulus SLTA. Ibu 2 orang anak, 1 orang putra dan 1 orang putri ini merupakan salah satu aktifis perempuan pesisir.

Nurhayati merupakan salah satu penggerak Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Kota Bandar Lampung. Pada saat di tanya mengenai permasalahan yang ada pada masyarakat pesisir, Nurhayati menuturkan :

*“Pesisir Kota Bandar Lampung merupakan wilayah yang selama ini mendapat perhatian yang kurang dari Pemerintah Kota Bandar Lampung, orientasi pembangunan yang ada pada saat ini lebih cenderung ke kawasan darat sehingga pembangunan di kawasan pesisir kurang terkendali dan cenderung tidak teratur sehingga terkesan seperti kolam sampah raksasa. Potensi kekayaan pesisir saat ini kurang dapat di pergunakan secara maksimal padahal potensi yang terkandung dalam kawasan pesisir sangat luar biasa. Permasalahan pokok yang ada pada masyarakat pesisir merupakan permasalahan ekonomi. Sebagian besar masyarakat pesisir merupakan masyarakat miskin dengan tingkat pendapatan kurang dari Rp. 700.000,- per bulan yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan, sehingga tarap hidup masyarakat dapat dikatakan jauh dari kata sejahtera. Minimnya kesejahteraan masyarakat inilah yang menyebabkan kawasan pesisir menjadi kawasan*

*kumuh. Banyak masyarakat yang mendirikan bangunan dengan seenaknya di bibir pantai sebagai tempat tinggal dan membuang limbah rumah tangganya kelaut hal tersebut tidak dibarengi oleh sikap tegas pemerintah untuk melarang masyarakat mendirikan bangunan di bibir pantai sehingga penataan lingkungan dapat terkendali”*

Ketika di tanya mengenai peran perempuan pesisir dalam mengatasi masalah ekonomi, Nurhayati menuturkan :

*“Sebelum terbentuknya Jaring Perempuan Pesisir (JPPrP) Kota Bandar Lampung para ibu dan remaja putri hanya terbatas menunggu nafkah dari suami atau kepala keluarga, sedangkan kita sama-sama tahu bahwa kebutuhan ekonomi sangat mendesak. Oleh karena itu kami melakukan pendekatan dengan berbincang dalam satu wadah yang memfasilitasi permasalahan yang kami hadapi. Sadar bahwa kami memerlukan wadah dan kami melakukan pendekatan personal dengan perempuan sekitar. Pada saat kami telah bergabung dalam suatu wadah Lembaga Swadaya Masyarakat, kami menganalisa permasalahan-permasalahan yang kami hadapi. Permasalahan utama yang timbul adalah sumber pendapatan bagi perempuan untuk membantu kepala keluarga memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Minimnya peluang usaha dan rendahnya penyerapan tenaga bagi para perempuan kerja tolak ukur permasalahan yang ada sehingga kami melakukan pelatihan-pelatihan pengembangan usaha seperti kegiatan daur ulang sampah.dan sekarang Alhamdulillah dari kegiatan tersebut para perempuan yang tergabung dalam Jaring Perempuan Pesisir mendapatkan penghasilan tambahan walaupun tidak banyak tetapi minimal dapat mengurangi beban kebutuhan rumah tangga”*

Ketika di tanya mengenai persepsi masyarakat pesisir terhadap penataan wilayah pesisir, Nurhayati menjelaskan :

*“Pada dasarnya masyarakat pesisir mendukung program tersebut namun yang dikhawatirkan oleh masyarakat pesisir ialah relokasi atau penggusuran, ada ketakutan dari mereka apabila terjadi penggusuran mereka akan kehilangan hak ganti rugi tanah dan bangunan karena keberadaan mereka saat ini dapat di katakan ilegal sebab tidak memiliki sertifikat tanah tambah lagi sebagian besar mata pencaharian masyarakat pesisir merupakan sebagai nelayan sehingga banyak dari mereka terancam kehilangan mata pencaharian. Oleh sebab itu penolakan masyarakat terhadap penataan pesisir tidak beralasan, satu sisi masyarakat sadar dan menganggap penataan pesisir perlu dilakukan sisi lain masyarakat tidak*

*menghendaki adanya relokasi yang mengharuskan mereka pindah dari kawasan mereka tinggal karena di sini lah tempat mereka menjalani kehidupan selama puluhan tahun.”*

### 3. Informan 3 (G/49)

Nama : Gunawan

Status : Kawin

Lama Tinggal : 39 Tahun

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Gunawan merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil Kota Bandar Lampung. Bapak 3 orang anak ini bertempat tinggal di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Telukbetung Selatan. Ketika ditanya mengenai permasalahan yang terjadi pada masyarakat pesisir Kota Bandar Lampung, Gunawan menyatakan :

*“Secara sosial-ekonomi kehidupan masyarakat pesisir sangat jauh dari taraf hidup sejahtera karena masih banyak penduduk pesisir hidup di bawah garis kemiskinan. Sebagian dari mereka berpenghasilan sebagai nelayan, buruh dan tukang becak yang berpendapatan Rp. 10.000,- per hari. Nilai tersebut sangat dirasakan sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari belum di tambah biaya pendidikan anak-anak mereka. Banyak masyarakat di Kelurahan Sukaraja mengeluhkan banjir apabila ada air pasang laut. Apabila laut sedang pasang air laut bias setinggi lutut orang dewasa dan hal tersebut terjadi setiap hari pada saat pasang laut. Hal tersebut jelas mengganggu masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Masyarakat berharap ada bantuan pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Padatnya bangunan penduduk pun menjadi penyebab terjadinya air pasang laut naik.”*

Ketika di tanya mengenai RUSUNAWA, Gunawan menjelaskan :

*“Sebenarnya program RUSUNAWA bukan hal yang baru bagi masyarakat pesisir. Pada saat pemerintahan yang lalu program RUSUNAWA sudah di canangkan dan sudah di sosialisasikan kepada masyarakat pesisir bahkan sudah di bangun RUSUNAWA di daerah Telukbetung Barat. RUSUNAWA itukan diperuntukan bagi masyarakat pesisir yang ingin di pindahkan oleh pemerintah. Namun pemerintah pada saat itu membebani masyarakat yang pindah ke RUSUNAWA dengan biaya sewa. Hal tersebut mendapat*

*penolakan dari masyarakat. Menurut mereka apabila mereka ingin di pindahkan dari tempat tinggalnya saat ini pemerintah harus mengganti atau menyediakan tempat yang layak kepada mereka secara gratis. Mereka kan di gusur tapi ko malah harus membayar uang sewa apabila tinggal di RUSUNAWA. Jelas ini memberatkan warga, belum lagi banyak dari warga yang mengeluhkan letak RUSUNAWA yang berada di daerah pedalaman sehingga sulit di jangkau kendaraan umum.”*

Ketika di tanya mengenai persepsi masyarakat terhadap penataan pesisir Kota

Bandar Lampung, Gunawan menyatakan :

*“Secara pribadi saya mendukung program Pemerintah Kota Bandar Lampung sebab penataan pesisir Kota Bandar Lampung saat ini sudah menjadi hal yang mendesak bagi pembangunan Kota Bandar Lampung. Dengan adanya penataan wilayah pesisir Kota Bandar Lampung secara langsung akan berdampak pada perkembangan ekonomi. Setiap pembangunan pasti akan menimbulkan relokasi itu merupakan konsekuensi dari pembangunan. Mau tidak mau, suka tidak suka sebagai warga masyarakat kita harus bersedia apabila harus direlokasi karena Pemerintah Kota Bandar Lampung menyediakan RUSUNAWA yang diperuntukan bagi masyarakat pesisir oleh sebab itu saya sebagai warga yang tinggal di kawasan pesisir harus bersedia apabila ada relokasi. Pemerintah harus berani mengambil tindakan tegas apabila ingin memajukan pembangunan ekonomi Kota Bandar Lampung. Setuap tindakan pasti ada konsekuensinya. Kebijakan pemerintah pada saat ini cenderung kearah politik, dengan tujuan politik kelompok dan tidak secara murni ingin membangun pembangunan Kota Bandar Lampung. Pembangunan akan terhambat apabila di ikuti dengan kepentingan politik. Masyarakat butuh kesejahteraan apabila Pemerintah ingin mensejahterkan masyarakat pemerintah harus berani meskipun hal itu di khawatirkan mendapat penolakan dari warga. Jangan takut kehilangan dukungan masyarakat, keberhasilan pembangunan justru akan membawa perubahan bagi masyarakat.”*

#### 4. Informan 4 (AJ/52)

Nama : Abdul Jalil, S,IKom.I

Status : Kawin

Lama Tinggal : 52 Tahun

Pekerjaan : Penghulu

Abdul Jalil, seorang penghulu Kelurahan Sukaraja berusia 52 tahun. Ia berasal dari Serang Banten. Abdul Jalil mempunyai seorang istri dan 2 orang anak yang bertempat tinggal di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Telukbetung Selatan.

Ketika di tanya mengenai pandangan beliau terhadap permasalahan yang terjadi pada masyarakat pesisir, Abdul Jalil menjelaskan :

*“Secara umum permasalahan yang ada pada masyarakat pesisir ialah masalah ekonomi. Banyak masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap. Apalagi pada musim pancaroba seperti saat ini angin laut sangat berbahaya apabila sedang berlayar mencari ikan. Masyarakat nelayan di sini kebanyakan tidak berlayar apabila sedang musim pancaroba. Secara langsung hal tersebut berpengaruh pada tingkat pendapatan mereka. Pada umumnya setiap kawasan baik kawasan pesisir maupun kawasan perkotaan sekali pun memiliki permasalahan yang sama yaitu permasalahan ekonomi. Rata-rata dari masyarakat pesisir berpenghasilann kurang dari Rp.10.0000,- per hari.*

Ketika di tanya mengenai RUSUNAWA, Abdul Jalil menjelaskan :

*“Saat ini rusunawa yang di bangun Pemerintah Kota Bandar Lampung sudah di tempati ratusan kepala keluarga, itu artinya masyarakat pesisir menyambut baik keberadaan RUSUNAWA tersebut. Namun masalahnya sosialisasi yang di lakukan pemerintah belum menyentuh kepada masyarakat pesisir secara langsung. Kami tidak mengetahui konsekuensi apabila kami bersedia di pindahkann ke RUSUNAWA. Apakah kami mendapatkan ganti rugi tanah dan banguna atau tidak. Belum lama ini Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mengadakan perjanjian dengan*

*masyarakat pesisir yang intinya Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak akan merelokasi masyarakat pesisir. Hal tersebut tentunya di sambut baik oleh masyarakat pesisir. Terlepas dari masterplan Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menjadikan kawasan Pesisir Kecamatan Telukbetung Selatan sebagai tempat perdagangan dan pariwisata masyarakat belum mengetahui hal tersebut.*

Ketika ditanya mengenai persepsi masyarakat dengan adanya rencana Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menata kawasan pesisir Kota Bandar Lampung, Abdul Jalil menyatakan :

*“Konsep Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menata kawasan pesisir Kota Bandar Lampung sangat baik karena bertujuan menata pembangunan daerah. Masyarakat pesisir pada umumnya mendukung program tersebut namun masyarakat menolak apabila ada rencana relokasi. Penataan ruang yang ideal menurutnya harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat setempat tidak dipinggirkan akibat kepentingan-kepentingan bisnis para elit. Keberadaan masyarakat selama puluhan tahun bukan tidak memberikan kontribusi kepada daerah. Masyarakat pesisir yang rata-rata berprofesi sebagai nelayan telah memenuhi kebutuhan ikan Kota Bandar Lampung selama puluhan tahun. Terlepas dari kumuhnya kawasan pesisir, pemerintah harus mengakui bahwa masyarakat pesisir telah menjadi bagian dari pembangunan pesisir Kota Bandar Lampung dan berharap Pemerintah mengikutsetakan masyarakat pesisir dalam program pembangunan tersebut. Selama ini kan Pemerintah hanya mementingkan kepentingan bisnis para pengusaha dan mengesampingkan kepentingan masyarakat pesisir. Saat ini Pemerintah Kota Bandar Lampung sedang menata perkampungan nelayan yang berada di Kelurahan Sukaraja. Hal tersebut mendapatkan respon positif dari masyarakat sebab penataan tersebut bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat.”*

## 5. Informan 5(H/48)

Nama : Hidayatullah

Status : Kawin

Lama Tinggal : 5 Tahun

Pekerjaan : Pegawai Pelindo

Hidayatullah merupakan seorang Pegawai Pelindo Lampung yang bertempat tinggal di Kelurahan Bumiwaras Kecamatan Telukbetung Selatan. Bapak 2 orang anak berusia 48 tahun ini bersuku Lampung. Sebagai masyarakat asli Lampung dan bekerja di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung tentunya Hidayatullah memahami permasalahan yang ada pada masyarakat pesisir Kota Bandar Lampung.

RUSUNAWA merupakan pemukiman alternative yang di peruntukan bagi masyarakat pesisir. Ketika ditanya mengenai RUSUNAWA, Hidayatullah menjelaskan :

*“RUSUNAWA di bangun untuk warga yang bersedia dipindahkan, namun banyak masyarakat pesisir menolak RUSUNAWA. Alasan mereka ialah apabila masyarakat menerima RUSUNAWA itu sama saja masyarakat bersedia di relokasi, apalagi selama ini masalah ganti rugi bangunan dan tanah belum jelas. Apabila setiap kecamatan di bangun 2 RUSUNAWA yang letaknya tidak berjauhan tentu kami setuju dengan catatan ganti rugi tanah dan bangunan yang sesuai. RUSUNAWA itu kan rumah susun sewa tentu bagi masyarakat yang bersedia pindah bermukim ke RUSUNAWA di bebani dengan biaya sewa. Pendapatan masyarakat pesisir Rp10.000,- per hari bahkan kurang, maka mungkin masyarakat dibebani dengan biaya sewa jelas ini sangat memberatkan masyarakat.”*

Ketika ditanya mengenai persepsi masyarakat pesisir terhadap penataan wilayah pesisir Kota Bandar Lampung, Hidayatullah menjelaskan :

*“Pada tahun 2008 Pemerintah mencangkan Program Pembangunan Waterfront City atau Kota Tepi Pantai. Seiring dengan bergantinya pemimpin maka berganti pula lah kebijakan Pemerintah Kota. Sebab pembangunan Waterfront City dianggap oleh Pemerintah Kota saat ini merupakan pembangunan yang tidak mungkin di lakukan. Tidak mudah bagi pemerintah untuk menata Kawasan Pesisir Kota Bandar Lampung dengan cara relokasi sebab di kawasan ini terdapat puluhan ribu warga masyarakat yang kehidupannya tergantung dari kawasan pesisir. Namun apabila Program Pembangunan tersebut sebatas menata pemukiman masyarakat pesisir tentu hal tersebut di sambut baik oleh masyarakat. Secara pribadi saya menganggap penataan pesisir Kota Bandar Lampung merupakan suatu program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah. Penataan pesisir Kota Bandar Lampung dapat meningkatkan pendapatan daerah sebab di kawasan pesisir ini lah terdapat berjuta kekayaan alam yang belum secara maksimal digunakan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung terdapat potensi pariwisata, perikanan, perkebunan sumberdaya laut yang masih belum dapat di lakukan oleh masyarakat setempat. Apabila penataan kawasan pesisir diikuti dengan rencana relokasi maka saya sebagai masyarakat pesisir yang memiliki hak kepemilikan tanah dan bangunan yang sah di keluarkan oleh BPN Kota Bandar Lampung maka saya berhak menuntut ganti rugi dan pemerintah tidak dapat sertamerta merelokasi masyarakat yang memiliki sertifikat tanah tanpa adanya keputusan ganti rugi yang sesuai dengan nilai jual tanah dan bangunan yang berlaku. Pemerintah seharusnya mencanangkan program pembinaan terhadap masyarakat pesisir dalam hal pengolahan sumber daya yang terkandung di kawasan pesisir. Bukan hanya mencanangkan pembangunan saja tetapi masyarakat di arahkan untuk dapat menggali potensi kawasan pesisir. Dengan kata lain masyarakat pesisir di arahkan untuk dapat mengolah sumber daya yang ada di kawasan pesisir”*

## 6. Informan 6 (SE/53)

Nama : Santi Enita

Status : Kawin

Lama Tinggal : 53 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Santi Enita merupakan seorang ketua pengajian yang ada di Kelurahan Garuntang Kecamatan Telukbetung Selatan. Ibu 2 orang anak berusia 53 tahun ini bersuku Padang. Sebagai seorang yang aktif dalam kegiatan keagamaan di Kelurahan Garuntang Kecamatan Telukbetung Selatan tentu Santi memahami permasalahan pokok yang terdapat di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung. Ketika ditanya mengenai permasalahan yang di hadapi masyarakat pesisir, Santi menjelaskan :

*“Banyak dari masyarakat tidak memahami permasalahan yang mereka hadapi, yang masyarakat tahu hanya bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sebagian besar dari masyarakat pesisir berkerja sebagai buruh, nelayan dan dagang, rata-rata pendidikan mereka hanya tamatan SLTP. Hal tersebut telah menjadi kendala bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan. Permasalahan sosial-ekonomi telah menjadi permasalahan pokok masyarakat pesisir selama puluhan tahun. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeliharaan lingkungan membuat kawasan pesisir Kota Bandar Lampung menjadi kawasan kumuh. Masyarakat seakan tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya, padahal mereka dapat menggali potensi kekayaan yang terkandung di kawasan pesisir. Hal ini dapat di pelajari melalui pelatihan-pelatihan yang di adakan pemerintah baik tingkat Pemerintah Provinsi Lampung maupun Pemerintah Kota Bandar Lampung. Banyak*

*warga masyarakat yang enggan mengikuti pelatihan-pelatihan, alasan mereka tidak adanya waktu untuk mengikuti kegiatan tersebut sebab mereka harus mencari nafkah.”*

Ketika ditanya mengenai persepsi masyarakat pesisir terhadap penataan wilayah pesisir Kota Bandar Lampung, Santi menjelaskan :

*“Tujuan pemerintah untuk menata kawasan pesisir Kota Bandar Lampung mendapatkan respon positif dari masyarakat pesisir. Kami mendukung sepenuhnya program pemerintah namun kami menolak apabila kami harus di relokasi sebab kehidupan kami sangat tergantung pada kawasan pesisir, di sini lah kami hidup dan disini lah kami mati. Apa tidak ada alternatif masyarakat dilibatkan? Kami ini kan hidup turun-temurun dari laut. Kalau tidak di pesisir laut, apa bisa hidup? Nelayan tidak akan bisa hidup jauh dari laut. Saat ini pemerintah telah memperbaiki perkampungan nelayan di Kelurahan Sukaraja tentu masyarakat setempat mendukung program tersebut. Masyarakat pun memahami tujuan dari suatu pembangunan ialah untuk mensejahterakan masyarakat. Pembangunan bertujuan meningkatkan perkembangan dan penyebaran kegiatan ekonomi masyarakat yang secara langsung berimbas pada kesejahteraan masyarakat. Penataan pesisir dapat dilakukan dengan tidak merelokasi masyarakat pesisir. Selama ini yang di khawatirkan masyarakat ialah apabila ada penataan wilayah pesisir maka masyarakat terancam terelokasi, kekhawatiran tersebut beralasan sebab banyak dari masyarakat pesisir tidak memiliki sertifikat tanah. Banyak dari mereka mendirikan bangunan di zona larangan pendirian bangunan, namun hal tersebut telah dibiarkan pemerintah selama puluhan tahun. Ketidaktegasan pemerintah dalam melaksanakan peraturan telah menimbulkan penataan kawasan pesisir tidak teratur.”*